



EVALUASI KEBIJAKAN AKTIVITAS TRANSPORTASI BUS KARYAWAN DI JALAN UMUM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA: STUDI KASUS DI KECAMATAN LOA KULU KAB. KUKAR

M. Akmal Fauzi¹

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
mhdakmalfauzi23@gmail.com

Abstrak

Aktivitas transportasi bus karyawan oleh perusahaan pertambangan batu bara yang melintasi jalan umum di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan sosial, keselamatan lalu lintas, serta kenyamanan masyarakat sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan perusahaan terkait operasional bus karyawan, meninjau tingkat kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, serta mengidentifikasi persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap aktivitas tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perusahaan belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek keselamatan dan keluhan warga, terutama terkait waktu operasional, kecepatan kendaraan, serta koordinasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian besar sopir bus tidak sepenuhnya mematuhi aturan lalu lintas, yang berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan. Masyarakat setempat menyampaikan keprihatinan atas peningkatan polusi udara dan suara serta penurunan kenyamanan hidup. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan ulang kebijakan transportasi internal perusahaan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk menciptakan transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Kata kunci

Evaluasi Kebijakan, Transportasi Bus Karyawan, Tambang Batu Bara, Jalan Umum, Loa Kulu

I. Pendahuluan

Kegiatan pertambangan batu bara merupakan salah satu sektor industri strategis yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional maupun daerah, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Dalam menunjang operasionalnya, perusahaan tambang umumnya menyediakan fasilitas transportasi bagi karyawan, seperti bus antar-jemput, yang melintasi jalur-jalur umum di sekitar area operasional. Di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, aktivitas transportasi bus karyawan oleh perusahaan tambang telah menjadi bagian dari rutinitas harian yang berdampak langsung terhadap masyarakat dan kondisi lalu lintas setempat.

Namun demikian, penggunaan jalan umum oleh kendaraan operasional perusahaan, termasuk bus karyawan, kerap menimbulkan persoalan, seperti kemacetan, penurunan kualitas infrastruktur jalan, peningkatan potensi kecelakaan, hingga keluhan dari masyarakat sekitar terkait polusi dan kebisingan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan perusahaan dalam mengatur transportasi karyawan telah mempertimbangkan aspek keselamatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan harmonisasi dengan kepentingan publik.

Angkutan bus Karyawan diatur Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Peraturan ini mengatur tentang standar teknis kendaraan bermotor, termasuk kendaraan angkutan umum seperti bus. Aturan ini juga mencakup regulasi mengenai pengujian kendaraan untuk memastikan keselamatan dan kelayakan kendaraan dalam beroperasi di jalan umum. Dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomer 10 Tahun 2012 mengatur penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk pengangkutan tambang batubara Namun, dalam prakteknya, kebijakan transportasi ini seringkali menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan, baik dari segi operasional, efisiensi biaya,

kenyamanan karyawan, maupun dampaknya terhadap lingkungan dan keselamatan kerja. evaluasi terhadap kebijakan ini menjadi sangat penting untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Evaluasi terhadap kebijakan transportasi bus karyawan menjadi penting untuk memastikan bahwa operasional perusahaan tidak hanya berorientasi pada efisiensi internal, tetapi juga memperhatikan dampak eksternal terhadap lingkungan sosial dan infrastruktur publik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas kebijakan yang diterapkan, meninjau kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, serta mengidentifikasi persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap keberadaan aktivitas transportasi tersebut.

Melalui studi kasus di Kecamatan Loa Kulu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika transportasi bus karyawan pada perusahaan tambang batu bara dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan.

II. Pembahasan

Kebijakan transportasi bus karyawan yang diterapkan oleh perusahaan pertambangan batu bara di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mendukung kelancaran operasional serta memenuhi aspek keselamatan kerja dan efisiensi biaya. Namun, keberadaan armada bus yang secara rutin melintasi jalan umum di wilayah tersebut menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat sekitar, pengguna jalan lainnya, dan lingkungan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemangku kepentingan (stakeholders) seperti warga, pengemudi lokal, dan aparat desa,

diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan utama yang muncul akibat aktivitas bus karyawan ini. Pertama, frekuensi tinggi dan ukuran besar bus menyebabkan kemacetan, terutama pada jam sibuk (pagi dan sore hari). Jalan umum yang dilalui yang umumnya sempit dan belum sepenuhnya dirancang untuk lalu lintas kendaraan berat tidak mampu menampung volume kendaraan dengan optimal.

Kedua, dari sisi keselamatan, ditemukan adanya potensi kecelakaan lalu lintas yang meningkat seiring dengan intensitas perjalanan bus karyawan, terutama di tikungan tajam dan area dekat pemukiman. Keluhan dari masyarakat juga mencakup kelalaian pengemudi bus dalam menaati batas kecepatan dan rambu lalu lintas, yang semakin memperparah situasi di lapangan.

Dari sisi kebijakan, perusahaan dinilai telah memiliki pedoman internal terkait rute dan jadwal operasional bus, namun koordinasi dengan pemerintah daerah serta sosialisasi kepada masyarakat masih minim. Hal ini menimbulkan kesan bahwa aktivitas transportasi bus lebih berpihak pada kepentingan perusahaan tanpa mempertimbangkan keseimbangan kepentingan publik.

Beberapa perusahaan juga diketahui tidak melakukan kajian dampak lalu lintas (ANDALALIN) secara menyeluruh sebelum menentukan jalur operasional bus. Ketidakhadiran evaluasi berkala menyebabkan kebijakan menjadi stagnan dan tidak adaptif terhadap perubahan kondisi jalan dan dinamika sosial.

Namun demikian, perlu juga dicatat bahwa dari sisi pekerja, kebijakan ini dinilai cukup efektif dalam memberikan akses transportasi yang aman dan tepat waktu menuju lokasi tambang. Hal ini mendukung produktivitas kerja serta mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, yang pada akhirnya juga berkontribusi terhadap penurunan emisi gas buang secara individu.

Sebagai rekomendasi, penting bagi perusahaan untuk melakukan sinkronisasi kebijakan transportasi dengan pemerintah daerah, termasuk penyesuaian jalur, waktu operasi, dan penerapan teknologi pemantauan seperti GPS tracking. Selain itu, perlu diadakan forum komunikasi rutin antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah desa untuk mengidentifikasi dan memitigasi permasalahan sejak dini.

Dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan kolaboratif, kebijakan transportasi bus karyawan dapat dioptimalkan agar tidak hanya mendukung kelancaran operasi perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat dan kenyamanan bagi masyarakat luas di Kecamatan Loa Kulu.

1. Apa Saja Dampak Kebijakan Transportasi Bus Karyawan Tambang Batu Bara Terhadap Kondisi Infrastruktur Jalan Umum Yang Dilalui.

Dampak Kebijakan Transportasi Bus Karyawan Tambang Batu Bara terhadap Infrastruktur Jalan Umum Kebijakan penggunaan bus karyawan sebagai moda transportasi utama bagi pekerja tambang batu bara memberikan dampak signifikan terhadap kondisi infrastruktur jalan umum yang dilalui setiap hari. Di satu sisi, kebijakan ini membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga dapat menekan kemacetan dan emisi gas buang. Namun di sisi lain, intensitas operasional bus berukuran besar dengan frekuensi tinggi turut mempercepat kerusakan jalan, terutama jika jalan tersebut tidak dirancang untuk menahan beban kendaraan berat secara terus-menerus.

Sebagian besar jalur yang dilalui bus karyawan berada di wilayah pedesaan atau semi-urban, seperti di Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara, di mana jalan umum yang ada tidak selalu dirancang untuk lalu lintas kendaraan berat dan berkapasitas tinggi. Bus karyawan, meskipun bukan kendaraan tambang berat, tetap memiliki berat total (GVW) yang tinggi dibanding kendaraan pribadi. Tingkat kerusakan

jalan umum sangat dipengaruhi oleh jumlah sumbu kendaraan berat dan frekuensi per lintasan. Jalan kelas III dan IV yang sering dilalui bus besar cenderung mengalami retak rambut, rutting (alur), dan akhirnya kerusakan struktural seperti berlubang (potholes). Sistem transportasi industri yang tidak mempertimbangkan kemampuan jalan dapat menyebabkan penurunan umur teknis jalan hingga 30–50% lebih cepat dari desain awal.¹

Karena jalan umum yang digunakan umumnya dibiayai oleh APBD atau APBN, kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas transportasi industri meningkatkan beban anggaran daerah untuk pemeliharaan rutin maupun rehabilitasi jalan. Hal ini berimplikasi pada keadilan fiskal, karena kerusakan disebabkan oleh aktivitas privat (perusahaan), tetapi pemulihannya menjadi tanggung jawab publik. Pentingnya pengaturan kontribusi biaya (cost sharing) antara perusahaan pengguna jalan industri dan pemerintah melalui mekanisme kompensasi atau tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam infrastruktur.²

Dalam banyak kasus, pembangunan dan peningkatan jalan di wilayah pertambangan tidak memperhitungkan rencana jangka panjang transportasi karyawan maupun kendaraan tambang. Akibatnya, terjadi mismatch antara spesifikasi teknis jalan dan beban aktual kendaraan, yang memicu percepatan kerusakan.

Hal ini dapat dikategorikan sebagai perencanaan infrastruktur yang non-adaptif, dan memerlukan kolaborasi antara perusahaan tambang dan instansi teknis pemerintah dalam proses perencanaan dan rekonstruksi jalan. Kerusakan jalan umum akibat lalu lintas bus

¹ Nasution, M.N. (2004). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

² Sutanto, H. (2005). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

karyawan juga berdampak pada mobilitas masyarakat lokal, khususnya petani, pedagang, dan anak sekolah. Jalan yang berlubang, tergenang, atau rusak berat mengurangi aksesibilitas, meningkatkan risiko kecelakaan, dan memperburuk konektivitas antar wilayah.

2. Bagaimana Kebijakan Transportasi Bus Karyawan Tambang Batu Bara Mempengaruhi Keselamatan, Keamanan Pengguna Jalan Dan Meminimalisir Kemacetan Dan Dijalan Umum.

Kebijakan transportasi bus karyawan dalam industri pertambangan, khususnya tambang batu, merupakan bentuk strategi manajemen transportasi yang bertujuan untuk mendukung efisiensi operasional perusahaan sekaligus menjaga ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan umum. Implementasi kebijakan ini tidak hanya berdampak pada internal perusahaan, tetapi juga memiliki pengaruh eksternal terhadap lingkungan sosial dan sistem transportasi publik di sekitarnya.

Kebijakan penggunaan bus sebagai moda transportasi utama bagi karyawan tambang secara langsung menurunkan risiko kecelakaan lalu lintas. Dalam sistem transportasi massal, konsentrasi jumlah penumpang dalam satu kendaraan dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang beroperasi secara bersamaan, sehingga kepadatan lalu lintas menurun dan potensi kecelakaan berkurang. Pengelolaan transportasi yang efektif harus memperhatikan prinsip keselamatan melalui pengaturan kendaraan, kondisi jalan, dan perilaku pengemudi. Dengan adanya jadwal yang teratur, pemeriksaan kendaraan secara berkala, dan standarisasi keselamatan operasional, risiko teknis dan human error dapat diminimalisasi.³

Aspek keamanan tidak hanya berkaitan dengan keselamatan fisik tetapi juga kenyamanan dan kepastian hukum di jalan raya. Penggunaan

³ Susanto, H. (2005). Manajemen Transportasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

bus karyawan yang dikemudikan oleh sopir bersertifikat dan berpengalaman mengurangi kemungkinan perilaku berkendara yang berisiko tinggi, seperti kecepatan berlebihan dan pelanggaran lalu lintas. Pengemudi yang kompeten dan sistem transportasi yang terorganisasi dapat menciptakan rasa aman bagi pengguna jalan lain, terutama di kawasan industri dengan lalu lintas padat. Selain itu, sistem pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pengemudi dan armada turut menjamin bahwa kendaraan operasional tidak menjadi ancaman bagi pengguna jalan umum, terutama di kawasan permukiman yang dilalui rute tambang.⁴

Penggunaan bus karyawan memiliki peran strategis dalam menekan volume kendaraan pribadi, yang merupakan salah satu penyebab utama kemacetan. Kemacetan dapat ditekan dengan mendorong penggunaan angkutan massal dan pengaturan waktu perjalanan yang efisien. Perusahaan tambang batu umumnya mengoperasikan bus dalam jumlah terbatas namun dengan kapasitas besar, yang mampu menggantikan puluhan kendaraan pribadi sekaligus. Selain itu, penerapan sistem shift dan penjadwalan keberangkatan yang terdesentralisasi menghindarkan penumpukan arus lalu lintas pada jam-jam tertentu. Pendekatan ini juga sejalan dengan kebijakan lalu lintas berkelanjutan, yang mendorong pengurangan emisi dan konsumsi bahan bakar.⁵ Dari perspektif hukum, perusahaan tambang wajib menjamin: Keselamatan transportasi karyawan dan pengguna jalan umum, berdasarkan prinsip *due diligence* dalam hukum perusahaan dan keselamatan kerja (K3). Penerapan AMDAL dan UKL-UPL, yang mencakup analisis dampak lalu lintas kendaraan tambang dan

⁴ Nasution, M.N. (2004). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

⁵ Tamin, O.Z. (2002). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung: ITB Press.

bus karyawan terhadap masyarakat sekitar, dan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan, sebagaimana diatur dalam otonomi daerah (UU No. 23 Tahun 2014), khususnya sektor perhubungan yang menjadi urusan konkuren.

III. Kesimpulan

Kebijakan aktivitas transportasi bus karyawan pada perusahaan pertambangan batu bara di Kecamatan Loa Kulu merupakan bagian dari strategi operasional perusahaan untuk mengatur mobilitas tenaga kerja secara efisien, terpusat, dan aman. Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan bahwa kebijakan ini memiliki dua sisi dampak utama yang saling berkaitan, yaitu dampak terhadap kondisi infrastruktur jalan umum dan dampaknya terhadap keselamatan, keamanan, serta kelancaran lalu lintas di jalan umum. Dari segi keselamatan dan keamanan, penggunaan bus karyawan secara terorganisasi terbukti memberikan kontribusi positif. Sistem transportasi karyawan dengan bus mampu mengurangi jumlah kendaraan pribadi yang melintasi jalan umum setiap hari, sehingga turut mengurangi kepadatan lalu lintas dan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bus karyawan yang dikemudikan oleh sopir profesional dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat mampu menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib. Hal ini meningkatkan tingkat keselamatan bagi seluruh pengguna jalan, baik dari kalangan internal perusahaan maupun masyarakat umum di sekitar wilayah operasional tambang.

Selain itu, keberadaan kebijakan ini juga memiliki potensi besar dalam meminimalisir kemacetan, khususnya pada jam-jam sibuk di pagi dan sore hari. Dengan menyatukan mobilitas ratusan hingga ribuan karyawan ke dalam moda transportasi massal, volume kendaraan di jalan umum bisa ditekan secara signifikan. Efisiensi ini memberikan ruang gerak lebih luas bagi masyarakat sekitar untuk menggunakan jalan dengan lebih nyaman dan

aman.

Namun, di balik manfaat tersebut, dampak negatif terhadap infrastruktur jalan umum tidak dapat diabaikan. Jalan umum yang dilalui bus karyawan, terutama jalan kabupaten dan desa di Kecamatan Loa Kulu, pada umumnya bukan jalan kelas berat yang dirancang untuk menanggung beban kendaraan besar secara terus-menerus. Akibatnya, terjadi percepatan degradasi jalan berupa keretakan permukaan, retak memanjang, lubang (potholes), hingga deformasi struktural seperti alur (rutting). Penurunan kualitas jalan ini diperparah oleh kurangnya dukungan pemeliharaan dari perusahaan pengguna, sehingga beban rehabilitasi jalan sepenuhnya ditanggung oleh kurangnya dukungan pemeliharaan dari perusahaan pengguna, sehingga beban rehabilitasi jalan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan fiskal.

Kerusakan jalan akibat aktivitas bus karyawan tambang juga berdampak sosial secara tidak langsung, yaitu penurunan aksesibilitas masyarakat lokal. Masyarakat sekitar yang bergantung pada jalan tersebut untuk kegiatan ekonomi, pendidikan, dan sosial menjadi terdampak oleh kondisi jalan yang rusak. Selain meningkatkan risiko kecelakaan bagi pengendara motor atau pejalan kaki, hal ini juga menurunkan kualitas hidup masyarakat desa yang tinggal di sekitar jalur operasional perusahaan tambang.

Dari evaluasi ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan transportasi bus karyawan perusahaan tambang batu bara di Loa Kulu bersifat ambivalen: positif dari aspek efisiensi dan keselamatan lalu lintas, namun negatif dari aspek ketahanan infrastruktur dan keadilan pemanfaatan jalan umum. Oleh karena itu, diperlukan perumusan ulang kebijakan yang bersifat integratif dan berbasis kolaborasi antara pihak perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat. Langkah-langkah yang disarankan meliputi: Penyesuaian desain teknis dan peningkatan kualitas jalan yang menjadi jalur

operasional bus industri, Penyusunan kesepakatan kontribusi perusahaan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) infrastruktur atau skema kompensasi perawatan jalan, Penegakan regulasi lalu lintas yang sesuai, termasuk audit berkala terhadap kondisi kendaraan dan pelatihan sopir bus karyawan, dan Pelibatan masyarakat dalam evaluasi kebijakan transportasi, agar dampak sosial dapat diminimalisasi secara lebih adil dan transparan.

Daftar Pustaka

- Nasution, M.N. (2004). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutanto, H. (2005). *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tamin, O.Z. (2002). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung: ITB Press.

Halaman ini sengaja dikosongkan